

# IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PELAKSANAAN OPEN DEFECATION FREE (ODF) DI KELURAHAN MALLAWA, KECAMATAN MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

**Nurlia; Nurhaeda R**

nurlia@algazali.ac.id

STIA Al Gazali Barru

## ABSTRAK

*Penelitian ini berfokus kepada bentuk implementasi pengawasan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan open defecation free (ODF) di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan kendala-kendala yang dihadapi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi pengawasan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan Open Defecation Free (ODF) di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru berdasarkan indikator komunikasi sudah berjalan efektif dan efisien; sumberdaya manusia sudah cukup dan berkompeten sedangkan sumberdaya finansial yang digunakan masih kurang; disposisi sudah terlaksana dengan baik; dan struktur birokrasi tersusun dengan baik. 2) Kendala dihadapi dalam implementasi pengawasan pemerintah kelurahan terhadap pelaksanaan Open Defecation Free (ODF) di Kelurahan Mallawa antara lain sumberdaya finansial masih terbatas; kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan Open Defecation Free (ODF) dan evaluasi partisipatif masyarakat belum optimal serta tidak adanya peraturan kelurahan tentang sangsi buang air besar sembarangan (BABS).*

*Kata Kunci: Implementasi, Pemerintah Kelurahan, Open Defecation Free (ODF)*

# VILLAGE GOVERNMENT SUPERVISION IMPLEMENTATION IN THE IMPLEMENTATION OF OPEN DEFECATION FREE (ODF) IN MALLAWA VILLAGE, MALLUSETASI DISTRICT, BARRU REGENCY

## ABSTRACT

*This research focuses on the form of implementation of village government supervision in the implementation of open defecation free (ODF) in Mallawa Village, Mallusetasi District, Barru Regency and the obstacles faced. The results of this study indicate that: 1) The implementation of village government supervision in the implementation of Open Defecation Free (ODF) in Mallawa Village, Mallusetasi District, Barru Regency is based on effective and efficient communication indicators; human resources are sufficient and competent while the financial resources used are still insufficient; the disposition has been carried out well; and well structured bureaucratic structure. 2) Constraints faced in implementing the supervision of the urban village government on the implementation of Open Defecation Free (ODF) in Mallawa Village include limited financial resources; Public awareness of the importance of implementing Open Defecation Free (ODF) and community participatory evaluation has not been optimal and there is no sub-district regulation on sanctions for open defecation (BABS).*

*Keywords: Implementation, Village Government, Open Defecation Free (ODF)*

## A. PENDAHULUAN

Di Indonesia saat ini masih banyak menghadapi masalah kesehatan penduduk yang belum teratasi oleh Pemerintah Indonesia. Mulai dari rendahnya anggaran pemerintah untuk kesehatan hingga rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan kebersihan dan kesehatan diduga menjadi pemicu utama. Ada berbagai permasalahan kesehatan yang tampak dominan di Indonesia salah satunya keadaan kesehatan

lingkungan di Indonesia masih merupakan hal yang perlu mendapat perhatian, karena menyebabkan status kesehatan masyarakat berubah seperti: penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pembuangan air limbah penggunaan pestisida, peledakan penduduk, masalah gizi, masalah pemukiman, masalah kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan, ketersediaan obat, populasi udara, abrasi pantai, penggundulan hutan dan banyak lagi permasalahan yang masalah lainnya.

Masalah kesehatan lingkungan cenderung timbul karena kurangnya kesadaran masyarakat yang ingin hidup sehat. Pada dasarnya penyakit terjadi karena adanya interaksi antara berbagai elemen yang saling mempengaruhi lingkungan merupakan faktor yang berhubungan dengan kematian ataupun resiko untuk terjadinya suatu penyakit/kelainan yang disebabkan faktor lingkungan karena adanya interaksi antara komunitas manusia dengan lingkungan yang berimbas pada kesehatan masyarakat. Masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Keadaan ini ternyata menyebabkan bahwa pengetahuan tentang hubungan antara jenis lingkungan ini sangat penting agar dapat menanggulangi permasalahan lingkungan secara terpadu dan tuntas.

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris "*policie*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor

dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Menurut Keban (Asna Aneta, 2010: 55) bahwa "*Public Policy*" dapat dilihat sebagai konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja". Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan.
2. Sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi.
3. Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan
4. Sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan, sedangkan kebijakan tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) khusus pilar 1 tentang Desa atau Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) atau Stop BABS di Kabupaten Barru sebagai upaya mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya serta tujuan jangka panjang yaitu menurunya angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh sanitasi yang kurang baik, dan dapat mendorong terwujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan

- **Konsep *Open Defecation Free* (ODF)**

1. Pengertian *Open Defecation Free* (ODF)

ODF (*Open Defecation Free*) atau Stop BABS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarang yang berpotensi menyebarkan penyakit. Desa atau Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) atau Stop BABS adalah desa atau kelurahan yang 100% masyarakatnya

telah buang air besar di jamban sehat yaitu mencapai perubahan perilaku kolektif terkait Pilar 1 dari 5 pilar STBM. Desa STBM, selain menyandang status ODF, 100% rumah tangga memiliki dan menggunakan sarana jamban yang ditingkatkan dan telah terjadi perubahan perilaku untuk pilar lainnya seperti memiliki dan menggunakan sarana cuci tangan pakai sabun dan 100% rumah tangga mempraktikkan penanganan yang aman untuk makanandan air minum rumah tangga (Kemenkes, 2013)

2. Karakteristik Desa atau Kelurahan *Open Defecation Free* (ODF)

Indikator suatu desa/kelurahan dikatakan telah mencapai status ODF adalah (Kementerian Kesehatan RI, 2014):

- a. Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat (termasuk di sekolah).
- b. Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar.
- c. Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat.

- d. Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jamban sehat.
- e. Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total.

### 3. Verifikasi ODF

Verifikasi merupakan serangkaian kegiatan untuk mengetahui kebenaran informasi atas laporan yang disampaikan sertamemberikan pernyataan atas keabsahan dari laporan tersebut (Permenkes, 2014). Verifikasi tidak dilakukan oleh masyarakat pada komunitas yang mendeklarasikan ODF tersebut, tetapi sebaiknya dilakukan oleh komunitas lain untuk melakukan dan atau pihak lain dari luar komunitas tersebut.

### 4. Faktor yang Berkaitan dengan Open Defecation Free (ODF)

Notoatmodjo menjelaskan dalam pembentukan dan atau perubahan, perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam dan luar individu itu sendiri seperti:

- a. Faktor intern yang mencakup pengetahuan, persepsi, emosi, motivasi, dan sebagainya yang berfungsi untuk mengolah rangsangan dari luar.

- b. Faktor ekstern yang mencakup lingkungan sekitar, baik fisik atau non fisik seperti, iklim, manusia, sosial ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya.

Lawrence green mencoba menganalisis perilaku manusia dari tingkat kesehatan. Kesehatan seseorang atau masyarakat di pengaruhi oleh 2 faktor pokok, yakni faktor perilaku (*behaviour causes*) dan faktor di luar perilaku (*non-behaviour causes*). Perilaku itu sendiri ditentukan dan terbentuk dari 3 faktor:

- a. Faktor predisposisi (*predisposing factor*)

Faktor-faktor predisposisi (*predisposing factor*), yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.

- b. Faktor pemungkin (*enabling factor*)

Faktor-faktor pemungkin (*enabling factors*), yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan misalnya pukesmas, obat-obatan, alat-alat kontrasepsi, jamban dan sebagainya.

- c. Faktor penguat (*reinforcing factor*)

Faktor-faktor pendorong atau penguat (*reinforcing factors*) yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat. (Ayu Damayanti, 2017: 28-29)

#### 5. Manfaat *Open Defecation Free* (ODF)

Stop buang air besar sembarangan (STOP BABS) akan memberikan manfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjaga lingkungan menjadi bersih, sehat, nyaman dan tidak berbau dan lebih indah.
- b. Tidak mencemari sumber air/ badan air yang dapat dijadikan sebagai air baku air minum atau air untuk kegiatan sehari-hari lainnya seperti mandi, cuci, dll.
- c. Tidak mengundang vector (serangga dan binatang) yang dapat menyebarkan bibit penyakit, sehingga dapat mencegah penyakit menular.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tinggi, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu permasalahan pembangunan kesehatan di Indonesia adalah masalah kesehatan lingkungan.

Permasalahan kesehatan lingkungan yang mendominasi adalah masalah sanitasi. Tantangan pembangunan sanitasi di Indonesia adalah sosial budaya dan perilaku penduduk yang terbiasa buang air besar di sembarang tempat, khususnya ke badan air yang juga digunakan untuk mencuci, mandi dan kebutuhan lainnya.

Pemerintah terus berusaha untuk mengatasi masalah sanitasi, terutama akses penduduk terhadap jamban sehat. Pada tahun 2008 Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan Kepmenkes RI nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang kemudian diperkuat dengan Permenkes RI nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan yang digunakan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemukiman. Sanitasi total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan

(BABS) atau *Open Defecation Free (ODF)*. Prinsip dari pelaksanaan STBM adalah meniadakan subsidi untuk fasilitas sanitasi dasar dengan pokok kegiatan menggali potensi yang ada di masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri dan mengembangkan solidaritas sosial. Dalam Kemenkes RI nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) disebutkan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan seperti di tingkat RT/Dusun/Kampung memiliki peran dan tanggung jawab mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif, di tingkat desa berperan dan bertanggung jawab dalam membentuk tim fasilitator desa atau kader pemicu STBM untuk memfasilitasi gerakan masyarakat dan pada tingkat kecamatan pemerintah kecamatan berperan dan bertanggung jawab berkoordinasi dengan Badan Pemerintah yang lain dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM.

Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat merupakan strategi dengan melibatkan lintas sektor dengan leading sektor Kementerian Kesehatan dan aksi terpadu untuk menurunkan angka kejadian penyakit menular berbasis lingkungan serta meningkatkan perilaku hygiene dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia.

STBM sendiri merupakan suatu strategi dengan 5 pilar yang dikembangkan dan meliputi lima aspek penting yaitu:

1. Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)

Suatu kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.

2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

CTPS merupakan perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.

3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT)

PAMM-RT merupakan suatu proses pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan air minum dan pengelolaan makanan yang aman di rumah tangga.

4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga

Pengamanan sampah yang aman adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan atau pembuangan dari material

sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

#### 5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga

Proses pengamanan limbah cair yang aman pada tingkat rumah tangga untuk menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan.

Secara khusus, strategi STBM bukan dibuat untuk menyebarkan informasi semata, tetapi dengan dorongan dan dukungan terus menerus, sehingga tercipta kesadaran terhadap sanitasi baik secara sikap maupun gaya hidup. Dibaginya pelaksanaan STBM di bawah naungan lima pilar akan mempermudah upaya mencapai tujuan akhir STBM, tidak hanya untuk meningkatkan akses sanitasi masyarakat yang lebih baik tetapi juga merubah dan mempertahankan keberlanjutan praktik-praktik budaya hidup bersih dan sehat. Sehingga dalam jangka panjang dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh sanitasi yang kurang baik, dan dapat mendorong tewujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan STBM terbagi dalam 4 tahapan, yaitu persiapan, pemicuan, tindak lanjut dukungan, serta

pemantauan dan stimulasi perhatian yang dilakukan setelah deklarasi.

STBM dapat dikatakan berhasil apabila ketika masyarakat secara keseluruhan sudah berperilaku higienis dan saniter maka dikatakan komunitas tersebut mencapai kondisi Desa/Kelurahan STBM dimana kondisi komunitas tersebut dengan kondisi sebagai berikut:

1. 100% masyarakat sudah berubah perilakunya dengan status Desa/Kelurahan SBS (sudah terverifikasi oleh tim verifikasi dari puskesmas setempat),
2. Terjadi peningkatan kualitas sarana sanitasi yang ada,
3. Terjadi perubahan perilaku higienis saniter lainnya di masyarakat,
4. Adanya upaya pemasaran dan promosi sanitasi untuk pilar-pilar STBM yang lainnya, dan adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Pemerintah Kabupaten Barru merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang paling aktif mengkampanyekan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di wilayahnya. salah satu buktinya dengan adanya sertifikat ODF yang diterima beberapa kelurahan/desa. Sebanyak



17 desa dan kelurahan di Kabupaten Barru telah dinyatakan bebas *Open Defecation Free* (ODF). Hal itu ditandai dengan penyerahan sertifikat ODF kepada daerah tersebut di antaranya Garessi, Tanete, Paopao, Mallawa, Lipukasi, Lasitae, Lampoko, Balusu, Ajakkang, Siddo, Bojo, Nepo dan desa serta kelurahan di Kecamatan Tanete Riaja. Selain itu, desa atau kelurahan yang telah bersertifikat perlu dilakukan pengawasan/pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh pemerintah kelurahan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PELAKSANAAN *OPEN DEFECATION FREE* (ODF) DI KELURAHAN MALLAWA, KECAMATAN MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU”**.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Tylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Lexy J. Moleong, 2010: 4).

Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisisnya tidak bisa dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskripsikan segala fenomena yang ada dimasyarakat secara jelas.

Penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang dikemukakan di tabel (4.1) untuk memperoleh data secara lengkap. Data yang telah didapat dari proses wawancara dan observasi adakan disajikan dengan bentuk deskripsi dengan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Selain itu ada juga data yang mendukung yaitu denah lokasi dan foto-foto hasil observasi

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- **Implementasi pengawasan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru**

Pemerintah Kelurahan merupakan faktor penentu dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan terkhusus kebijakan tentang Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM) khusus pilar 1 tentang Desa atau Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) atau Stop BABS. Oleh karena itu lurah beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga keberhasilan program di kelurahan tergantung dari seberapa besar peranan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah kerjanya masing-masing begitupula peranannya dalam mempengaruhi masyarakat untuk turut serta di dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah kelurahan diatur dalam pasal 4 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa pemerintah kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur di pasal 5 ayat (1) bahwa lurah mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Di Kelurahan Mallawa memiliki berbagai macam program

pemberdayaan masyarakat salah satunya yaitu program STBM. Program pemberdayaan masyarakat (STBM) yang dikerjakan bermuara pada upaya untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Kelurahan Mallawa. Pelaksanaan STBM dalam jangka panjang dipercaya dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh sanitasi yang kurang baik, dan dapat mendorong terwujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan lima pilar akan mempermudah upaya meningkatkan akses sanitasi masyarakat yang lebih baik serta mengubah dan mempertahankan keberlanjutan budaya hidup bersih dan sehat di Kelurahan Mallawa. Pelaksanaan STBM dalam jangka panjang dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh sanitasi yang kurang baik, dan dapat mendorong terwujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan lima pilar di Kelurahan Mallawa mencakup stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, penegelolaan air

minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, dan pengamanan limbah cair rumah tangga. Dari keseluruhan program pemberdayaan berfokus pada pengembangan masyarakat melalui lembaga masyarakat yang ada di di Kelurahan Mallawa.

Implementasi pengawasan pemerintahan kelurahan dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) khusus pilar 1 tentang Desa atau Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) atau Stop BABS di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru berdasarkan teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### a. Komunikasi

Adapun implementasi pengawasan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru berdasarkan indikator komunikasi penulis jelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lurah Mallawa Mahyuddin yang mengatakan bahwa:

Kelurahan Mallawa menjadi salah satu kelurahan di Kabupaten Barru yang telah menggelar deklarasi ODF setelah memenuhi

proses verifikasi yang diadakan sebelumnya. Verifikasi ODF adalah proses memastikan status ODF suatu komunitas masyarakat yang menyatakan bahwa secara kolektif mereka telah bebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Kegiatan sosialisasi ODF sejak awal telah kami lakukan dengan berbagai kegiatan-kegiatan seperti seminar tentang pelaksanaan ODF kepada seluruh masyarakat. Adapun yang menjadi sasaran pelaksanaan ODF ini adalah masyarakat di Kabupaten Barru Khusus wilayah Kelurahan Mallawa. Selain itu deklarasi ODF yang telah dilakukan tentu tidak tercapai begitu saja namun melalui beberapa langkah program yang dilakukan secara bersama elemen masyarakat, organisasi dan lembaga kemasyarakatan, serta Dinas Kesehatan dengan pemerintah Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi hingga pemerintah Kabupaten Barru sebagai komitmen bersama menuju Kabupaten Barru berstatus *Open Defecation Free* di Indonesia.

Hal tersebut dibenarkan oleh masyarakat Kelurahan Mallawa Arman, bahwa:

Kami telah mengikuti kegiatan sosialisasi ODF yang dilaksanakan pemerintah Kelurahan Mallawa. Kegiatan tersebut sangat penting untuk mengedukasi masyarakat

agar melakukan pola hidup sehat. Selain itu, pengawasan terus dilakukan agar kelurahan kami tetap mempertahankan prestasi yang telah diperoleh. Diperlukan kesadaran dan Kerjasama semua pihak untuk mewujudkan status ODF ini.

Hal tersebut dipekuat oleh Sanitarian Puskesmas Palanro Sri Suprawati, bahwa:

Kami bersama Pemerintah Kelurahan Mallawa terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ODF. Selain itu, kami terus melakukan pendampingan kepada beberapa masyarakat yang membutuhkan bimbingan khusus.

Bedasarkan hasil dokumentasi Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 November 2019 tim Satuan Tugas melakukan Sosialisasi Kabupaten/Kota Sehat Melalui Gerakan Bersama Rakyat Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)/*Open Defecation Free* (ODF) Tahun 2019 di Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yang dihadiri oleh seluruh aparat kelurahan dan masyarakat di kelurahan Mallusetasi sebagai anggota satuan tugas kegiatan stop buang air besar sembarangan (BABS) mempunyai tugas:

- 1) Menyusun dan mengusulkan rencana aksi STBM Kabupaten Barru Tahun 2020 sebagai realisasi kegiatan penggerakan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)/*Open Defecation Free* (ODF) pada tahun 2021 sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- 2) Turun langsung ke lapangan wilayah binaan masing-masing untuk menggerakkan masyarakat secara bergotong-royong dan bersama membangun jamban sehat, sanitasi lainnya, melakukan pemantauan progres kegiatan yang telah dilakukan, melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil pemantauan yang dipandang perlu dan melaporkan ke ketua satgas melalui sekretaris satgas;
- 3) Menyusun instrument penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)/*Open Defecation Free* (ODF);
- 4) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)/*Open Defecation Free* (ODF);
- 5) Membuat draft instrument rencana aksi kegiatan;
- 6) Membuat laporan hasil kegiatan satgas masing-masing wilayah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan program STBM pilar pertama yaitu Stop BABS di Kelurahan Mallawa Kabupaten Barru dilakukan melalui beberapa tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan pemecuan, pemantauan atau pengawasan, pendampingan dan advokasi.

Implementasi pengawasan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru berdasarkan indikator komunikasi sudah berjalan efektif terbukti dengan petunjuk teknis yang jelas dari pemerintah Kabupaten Barru melalui kegiatan bimbingan teknis diberikan kepada lembaga dan instansi terkait, kegiatan sosialisasi yang secara bertahap terus dilakukan kepada masyarakat dan pengawasan terhadap pelaksanaan ODF secara rutin terus dilakukan secara bersama pemerintah Kelurahan Mallawa bersama UPTD Kesehatan Puskesmas Palanro, Babinsa, Kamtibmas, hingga melibatkan Kepala Lingkungan, Ketua RT dan RW. Salin itu, pengawasan dari pemerintah Kecamatan dan Kabupaten terhadap pelaksanaan program yang dijalankan di setiap Kelurahan juga terus dilakukan penilaian.

## b. Sumberdaya

Kemudian, implementasi pengawasan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru berdasarkan indikator sumberdaya penulis jelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lurah Mallawa Mahyuddin menjelaskan bahwa:

Deklarasi ODF di wilayah Kelurahan Mallawa merupakan pencapaian bersama jajaran pemerintahan Kelurahan, TNI/Polri, jajaran Puskesmas, tim verifikasi ODF, maupun elemen masyarakat yang telah mendukung dan berpartisipasi sehingga Kelurahan Mallawa meraih ODF. Setelah deklarasi ODF maka sangat penting dilakukan tindak lanjut berupa pelaksanaan pengawasan ODF secara berkelanjutan. Sumber dana pelaksanaan ODF bersumber dari dana APBD Kabupaten Barru, dana Anggaran Dana Kelurahan (ADK), dan Bantuan dari Badan Amil Zakat (BAZNAS).

Peneliti menilai sumberdaya manusia yang dimiliki pemerintahan Kelurahan Mallawa secara kuantitas sudah cukup untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan *Open Defecation Free* (ODF). Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan aparat yang ada di Kelurahan dan

Kepala Lingkungan yang ada di Kelurahan Mallawa hingga Ketua RT dan RW setempat. Selain itu berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kelurahan juga di manfaatkan. Sedangkan jika dinilai berdasarkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup baik karena SDM yang ada telah sadar tentang tugas dan tanggungjawab masing-masing tentang pentingnya pelaksanaan pengawasan ODF setelah dilakukan berbagai upaya hingga deklarasi telah dilakukan.

Menurut Staf Kelurahan Mallawa Iwan, bahwa:

Sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan ODF di Kelurahan Mallawa yaitu APBD Kabupaten Barru, dana Anggaran Dana Kelurahan (ADK), dan Bantuan dari Badan Amil Zakat (BAZNAS).

Selain itu, diakui pula oleh Mulyani bahwa:

Beberapa masyarakat Kelurahan Mallawa telah menerima bantuan pembuatan jamban sehat. Hal tersebut sebagian besar telah berhasil dibangun. Hal ini tentu mendapat sambutan baik dari masyarakat.

Sehingga, sumberdaya finansial yang digunakan dalam pelaksanaan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru secara normatif bersumber dari APBD, Anggaran Dana

Kelurahan (ADK), dan Bantuan dari mitra atau pendonor yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Barru.

Adapun secara operatif anggaran/ dana tersebut telah diberikan kepada 120 Kepala Keluarga berupa bantuan pembuatan sarana sanitasi berupa jamban sehat kepada warga yang kurang mampu seperti pemberian 120 Buah Closet, 120 Buah Penutup Cincin, 360 Buah Cincin, 120 Zak Semen, 60 m<sup>3</sup> Pasir, 12.000 Buah Bata dan 240 m Pipa yang dibagikan kepada keluarga yang tidak mampu secara finansial membangun sendiri jamban sehatnya. Tidak hanya itu, masyarakat tidak hanya diberikan bahan-bahan pembuatan jamban. Namun, lebih dari itu pemerintah kelurahan juga membiayai pembuatan jamban sehingga masyarakat langsung bisa menggunakannya.

Adapun, secara lebih jelas penerima hibah tersebut penulis lampirkan pada lampiran hasil dokumentasi tentang “Tabel Daftar Nama Penerima Hibah Daerah (NPHD) Program ODF *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Tahun 2020”.

### c. Disposisi

Implementasi pengawasan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Mallawa,

Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru berdasarkan indikator disposisi sudah baik. Ada tiga bentuk sikap implementor terhadap kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Adapun respon implementor terhadap pelaksanaan *Open Defecation Free* (ODF), penulis jelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lurah Mallawa Mahyuddin mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan ODF merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat bisa hidup lebih sehat. Kami sebagai masyarakat sangat mendukung program-program pemerintah yang sangat peduli dengan masyarakat miskin yang tidak mampu membuat sendiri jambannya karena keterbatasan ekonomi.

Diungkapkan pula oleh Iwan Staf Kelurahan Mallawa, bahwa:

Pemerintah Kabupaten Barru memberikan petunjuk teknis untuk pelaksanaan program STBM mulai dari perencanaan, pelaksanaan pemecuan, pemantauan atau pengawasan, pendampingan dan advokasi. Program ini menjadi komitmen bersama untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat Kabupaten Barru agar semakin baik.

Disposisi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Implementasi pengawasan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru berdasarkan indikator struktur birokrasi atau kelembagaan sudah sangat baik terbukti dengan hasil pengamatan peneliti bahwa terdapat struktur organisasi berupa Tim Pelaksana ODF di Kelurahan Mallawa, yaitu lurah selaku penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK), sekretaris kelurahan selaku penanggung jawab administrasi kegiatan (PJAK), kepala urusan keuangan selaku bendahara kelurahan dan Kepala Seksi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat selaku pelaksana dibantu oleh Kepala lingkungan dan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Mallawa seperti Organisasi LPM Kelurahan

Mallawa. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan oleh kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sebagai natural leader SBS.

Selain penilaian dari 4 indikator di atas penulis juga mencoba

menggambarkan pelaksanaan ODF di Kelurahan Mallawa berdasarkan karakteristik Desa atau Kelurahan *Open Defecation Free* (ODF) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2014 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 1. Pelaksanaan Open Defecation Free (ODF) di Kelurahan Mallawa**

No.	Karakteristik Desa atau Kelurahan <i>Open Defecation Free</i> (ODF)	Implementasi <i>Open Defecation Free</i> (ODF) di Kel. Mallawa
1.	Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat (termasuk di sekolah)	Setelah deklarasi ODF tidak ada lagi masyarakat yang BABS di sembarang tempat
2.	Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar	Warga masyarakat sadar akan hidup bersih dan sehat sehingga tidak terlihat tinja di lingkungan sekitar
3.	Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat	Pemerintah setempat terus menghimbau dan melakukan sosialisasi kepada warga. Namun belum ada sanksi kepada masyarakat yang melanggar
4.	Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jamban sehat	Warga masyarakat melaporkan kepada pemerintah setempat apabila ditemukan masyarakat yang tidak mempunyai jamban keluarga
5.	Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total	Upaya dan strategi bersama Pemerintah Daerah mulai dari Bupati Barru hingga Pemerintah Desa atau Kelurahan terus berkomitmen setelah pencapaian status ODF akan dilanjutkan ke pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) selanjutnya

Sumber: Observasi 2020

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau

kota Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan



pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelurahan menyelenggarakan fungsi sebagai:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan;
4. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
5. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan;
6. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kelurahan;
7. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan lembaga sosial

kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;

9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif agar kebijakan yang masih bersifat abstrak dapat menjadi realita sehingga memberikan *outcome* yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Menurut Kepala Bidang Infrastruktur Bappeda Sulawesi Selatan bahwa Kabupaten Barru merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan cakupan akses sanitasi layak tertinggi, yaitu mencapai 88,02%. Angka ini ditargetkan naik menjadi 90% pada 2024.

### **Implementasi pengawasan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan Open Defecation Free (ODF) di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru**

Kebijakan yang dibuat oleh pembuat keputusan (*policy makers*) bukanlah

jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak aspek yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok/institusi lingkungan serta kebijakan itu sendiri. Fokus utama dalam penelitian ini membahas implementasi pengawasan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan *open defecation free* (ODF) di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan kendala yang dihadapi dalam implementasi program tersebut berdasarkan empat variabel menurut teori Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

#### a. Komunikasi

Implementasi pengawasan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru berdasarkan indikator komunikasi sudah berjalan efektif terbukti dengan adanya petunjuk teknis yang jelas dari pemerintah Kabupaten Barru melalui kegiatan bimbingan teknis diberikan kepada lembaga dan instansi terkait; kegiatan sosialisasi yang secara bertahap terus dilakukan kepada masyarakat tentang sasaran, tujuan dan

manfaat pelaksanaan ODF; pengawasan terhadap pelaksanaan ODF secara rutin dan terjadwal terus dilakukan secara bersamapemerintahKelurahanMallawa bersama UPTD Kesehatan Puskesmas Palanro, Babinsa, Kamtibmas, hingga melibatkan Kepala Lingkungan, Ketua RT dan RT; dan pengawasan dari pemerintah Kecamatan dan Kabupaten Barru terhadap pelaksanaan program yang dijalankan di setiap Kelurahan juga terus dilakukan.

Pentingnya komunikasi dalam implementasi kebijakan publik diungkapkan Agustino (Mulyono: 153) bahwa implementasi kebijakan yang efektif akan terlaksana dengan baik, jika para pembuat keputusan mengetahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. "Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang memengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik"

Komunikasi program dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pihak-pihak yang terlibat atau yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan memahami atau mengetahui apa yang akan atau yang perlu dikerjakannya.

## D. KESIMPULAN

Dari analisis yang telah dirumuskan dari tinjauan teori dan hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis terhadap implementasi pengawasan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pengawasan pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru berdasarkan indikator komunikasi sudah berjalan efektif dan efisien; sumberdaya manusia sudah cukup dan berkompeten sedangkan sumberdaya finansial yang digunakan masih kurang; disposisi sudah terlaksana dengan baik; dan struktur birokrasi tersusun dengan baik.
2. Kendala dihadapi dalam implementasi pengawasan pemerintah kelurahan terhadap pelaksanaan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Mallawa antara lain sumberdaya finansial masih terbatas; kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan *Open Defecation Free* (ODF) dan

evaluasi partisipatif masyarakat belum optimal serta tidak adanya peraturan kelurahan tentang sangsi buang air besar sembarangan (BABS).

### • Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di atas maka dapat direkomendasikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam pelaksanaan *Open Defecation Free* (ODF) di Kelurahan Mallawa, yaitu:

1. Kepala Kelurahan, diharapkan lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan *Open Defecation Free* (ODF) dengan melibatkan seluruh aparat/petugas kelurahan hingga Ketua RT, RT dan Tokoh-Tokoh masyarakat dan petugas Puskesmas serta organisasi kemasyarakatan yang ada.
2. Kepada Masyarakat, untuk lebih berperan aktif dan evaluasi partisipatif dalam melakukan pengawasan terhadap program yang dilaksanakan pemerintah kelurahan serta melaporkan kondisi dilapangan kepada pihak kelurahan atau kecamatan agar dapat ditindak lanjuti sebagai dukungan masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhid, Sumarkan, Rakhmawati dan Lukman Fahmi. 2018. Perubahan Perilaku Open Defecation Free (ODF) melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Volume 2, Number 1 (99-119)
- Akib, Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 1 No. 1 (1-11)
- Aneta, Asna. 2010. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo*. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 Thn. 2010. 54-65. <https://www.neliti.com/id/publications/97581/implementasi-kebijakan-program-penanggulangan-kemiskinan-perkotaan-p2kp-di-kota>. Diakses pada 20 November 2020.
- Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (AIPI)).
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Damayanti, Ayu 2017. *Analisis Faktor Predisposisi Yang Berhubungan Dengan Perilaku Masyarakat Dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Di RW 004 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjokota Madiun Tahun 2017*. *Skripsi*. Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun, Madiun.
- W. Febriani, Samino, & N. Sari, "Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS): Studi Pada Program STBM di Desa Sumbersari Metro Selatan 2016. *Dunia Kesmas*, 5, Nomor 3, 2016.
- Indriyani, Yulis. 2016. Kajian Strategi Promosi Kesehatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. *Unnes Journal of Public Health*, 5 (3), 240-251.
- Juniarti, Vivi Rizky. 2018. *Implementasi Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Open Defecation Free) (Studi Di Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin*. *Skripsi*. Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Kemenkes RI. 2008. *Kepmenkes RI Nomor 852 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Lingkungan*. Menteri Kesehatan RI, Jakarta.
- Kemenkes RI. 2014. *Permenkes Nomor 3 Tahun 2014*. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Meleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyono Yalia. 2014. Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat. Balai Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika (BPPKI) Bandung, Badan Litbang Sdm Kementerian Komunikasi Dan Informatika Ri. Jurnal. Vol. 6 No.1, Maret 2014: 149-160
- STIA Al-Gazali Barru. 2019. Panduan Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi.
- Subarsono, 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Surya Murni Siregar dan Isnaini. 2014. Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Dalam Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir. *Jurnal Administrasi Publik*. Universitas Medan Area. Vol.6 No.2 (154-173)
- Wahyu Afiatul Qudsiyah, dkk. 2015. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingginya Angka Open Defecation (OD) di Kabupaten Jember (Studi di Desa Sumber Kalong Kecamatan Kalisat). *e-Jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol 3 (No. 2) 362-369.